



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA



2024

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165
Telp. (0274) 515865, 562682
Email : inspektorat@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278001 ; HOTLINE EMAIL :
upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.inspektorat.jogjakota.go.id

• • •
• • •
• • •

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Kota Yogyakarta dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian rencana kerja perubahan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta, dan RPD dan Renstra 2023-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat Daerah dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta,

INSPEKTUR



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan	1
1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan	2
1.3 Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	5
BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024	25
BAB V Penutup	31

DAFTAR TABEL

2.1	Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2023	5
2.2	Program, Sasaran, Indikator, Target 2023 & Target 2024	6
2.3	Tabel Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik Inspektorat	8
2.4	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024	15
3.1	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
- f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
- g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta No : 100.3.4.3/2414/SE12024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Perangkat Daerah (PD) termasuk Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Salah satu misi pembangunan Kota Yogyakarta yang tercantum dalam RKPD yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas. Sasaran dari misi tersebut adalah Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, serta Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 diantaranya adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, sesuai dengan prioritas pembangunan Propinsi DIY menjadi prioritas yang ke 7 yaitu kinerja aparatur dan birokrasi.

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan Renstra PD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD PD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Inspektorat Daerah Tahun 2023 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 31);

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57); dan
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 36).

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada **tabel 2.4**.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah **tabel 3.1**

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

A. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat tahun 2024 adalah :

1. **Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola Pemerintahan**, yang diukur dengan Indikator Sasaran “**Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)**”. Pada tahun 2023 target Nilai Kapabilitas APIP secara keseluruhan adalah pada level 3, dengan hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan DIY pada level 3 untuk 5 elemen penilaian dan level 4 untuk 1 elemen . Dengan demikian target nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Yogyakarta **tercapai** di tahun 2023 dan masih berjalan untuk penilaian di tahun 2024 dan masih menggunakan penilaian tahun 2023.
2. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat**, yang diukur dengan indikator sasaran “**Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat**”. Sasaran Kinerja ini di tahun 2024 dengan target nilai A. Adapun nilai di tahun 2023 prosentase ketercapaian pemenuhan Reformasi Birokrasi sebesar 95,37%

Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Inspektorat tahun 2023 :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Inspektorat Th 2023

Sasaran Inspektorat	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Keterangan
Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola Pemerintahan	Level 3	Level 3	Hasil penilaian BPKP Perwakilan DIY nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta adalah level 3 untuk 5 elemen dan level 4 untuk 1 elemen
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	Nilai A	95,37 %	Berdasarkan kategori penilaian pada PermenPAN RB 26 Th 2020 nilai 95,37% masuk pada kategori AA (Istimewa)

Terhadap sasaran program Inspektorat kota Yogyakarta pada tahun 2024 memiliki 3 Program, yaitu 2 Program yang mengampu pengawasan, dan 1 program penunjang program pengawasan. Adapun program dan sasaran yang dimaksud adalah :

Tabel 2.2 Program, Sasaran, Indikator, Target 2023, Realisasi 2023, & Target 2024

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Target Tahun 2024	Ket
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kepatuhan audit (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	95%	100%	95,2%	
	Kepatuhan audit (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	95%	100%	95,2%	
	Kepatuhan audit (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	95%	90,90%	95,2%	
	Kepatuhan audit (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	95%	100%	95,2%	
	Kepatuhan audit (stakeholder) terhadap hasil pengawasan eksternal meningkat	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	91%	100%	94,74%	Target 2024 ini merupakan usulan perbaikan kinerja di tahun 2024, dimana sebelumnya target tahun 2024 sebesar 91,1%

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Target Tahun 2024	Ket
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	18,18%	30,77%	27,27%	
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	20%	90,91%	50%	Target 2024 ini merupakan usulan perbaikan kinerja di tahun 2024, dimana sebelumnya target 2024 sebesar 30%
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	18,18%	41,67%	36,36%	Target 2024 ini merupakan usulan perbaikan kinerja di tahun 2024, dimana sebelumnya target 2024 sebesar 27,27%
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	40%	53,85%	50%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat meningkat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah	Nilai A	89,18 (Nilai A ; Predikat "Memuaskan")	Nilai A	

B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 30 Mei 2024) Tahun 2024 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.3 tabel Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik Inspektorat s.d 30 Mei 2024

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1.	INSPEKTORAT DAERAH	14.096.537.035	5.011.237.737	35,54%	39,99%	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13.282.871.575	4.854.571.665	36,54%	46,84%	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.537.800	19.252.000	24,20%	27,57%	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.121.700	4.425.000	39,78%	52%	
1.2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.410.000	730.000	30,29%	70%	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.975.000	0	0	10%	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.434.100	0	0	0	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.605.000	0	0	0	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	55.986.000	14.097.000	25,17%	48%	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.006.000	0	0	13%	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.477.826.000	3.860.616.344	36,84%	27%	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	10.458.621.000	3.854.958.344	36,85%	76%	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	575.000	575.000	100%	100%	
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan	575.000	0	0	0	

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.150.000	0	0	0	
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	575.000	0	0	0	
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	575.000	0	0	0	
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.180.000	4.508.000	29,69%	40%	
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	575.000	0	0	0	
A.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.034.500	3.088.500	43,90%	47,5%	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.102.500	0	0	0	
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.400.000	840.500	60,03%	63%	
3.3	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.157.000	529.000	45,72%	64%	
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.125.000	572.000	50,84%	53%	
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1.125.000	572.000	50,84%	53%	
3.6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.125.000	572.000	50,84%	52%	
A.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	750.143.500	355.257.000	47,35%	30,81%	
4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Kinerja Pegawai	750.143.500	355.257.000	47,35%	30,81%	
A.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	821.008.975	252.991.417	30,81%	52,14%	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.164.000	1.768.000	28,68%	51%	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.901.075	16.518.000	24,32%	54%	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.357.000	9.877.125	22,26%	54%	
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.124.900	2.578.900	12,20%	28%	
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	1.000.000	30,30%	35%	
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	672.692.000	214.648.392	31,90%	50%	
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	7.270.000	6.601.000	90,79%	93%	
A.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.755.800	147.600.000	63,96%	46,13%	
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.755.800	147.600.000	63,39%	46,13%	
A.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.507.000	108.115.419	25,11%	38,91%	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.087.000	420.000	10,27%	35%	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	1.226.169	20,43%	40%	
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	21.000.000	7.750.000	36,90%	39%	
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.420.000	98.719.250	24,71%	41,66%	
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.058.000	200.543.985	41,25%	57,82%	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.280.000	8.285.465	28,29%	47%	
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.350.000	25.365.110	11,61	39,87%	

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.428.000	7.340.500	17,30	49%	
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.000.000	159.552.910	81,40	85,43%	
B	PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	327.244.960	85.482.102	26,12%	46,91%	
B.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	208.418.160	57.097.972	27,39%	62,47%	
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74.672.410	24.615.400	32,96%	65%	
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	86.126.600	8.861.977	10,28%	16%	
1.3	Reviu Laporan Kinerja	11.777.250	11.273.000	95,71%	100%	
1.4	Reviu Laporan Keuangan	7.696.000	7.058.975	91,72%	100%	
1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	28.145.900	5.288.620	18,79%	31,35%	
B.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	118.826.800	28.384.130	23,88%	31,96%	
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	7.140.000	2.270.000	31,79%	36%	
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	111.686.800	26.114.130	23,38%	27,93%	
C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	486.420.500	71.183.970	14,63%	26,22%	
C.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	91.503.300	10.628.000	11,61%	27,5%	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	76.463.300	4.800.000	6,2%	20%	
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	15.040.000	5.828.000	38,75%	38,75%	
C.2	Pendampingan dan Asistensi	394.917.200	60.555.970	15,33%	24,94%	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	67.629.800	805.000	1,19%	2%	
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16.050.000	3.100.000	19,31%	33,33%	
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	277.698.400	46.548.970	16,76%	25,91%	
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33.539.000	10.102.000	30,12%	38,52%	
Total		14.096.537.035	14.179.839.325			

Sumber : Data Fungsional Subbag Keuangan s.d 30 Mei 2024

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2023) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Gaji dan TPP, diusulkan untuk penambahan anggaran untuk memfasilitasi pengangkatan dari CPNS ke PNS, serta kenaikan jabatan beberapa pegawai, namun data jumlah anggaran masih menunggu dari BPKAD dan BKPSDM
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, diusulkan bertambah untuk penambahan kebutuhan komponen instalasi listrik
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian alat tulis kantor
4. Penyediaan Peralatan Rumah tangga, diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian peralatan rumah tangga
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian barang keperluan penunjang perkantoran berupa barang cetakan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, diusulkan penambahan anggaran untuk penambahan anggaran jamuan ruang tunggu
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, diusulkan penambahan anggaran pada belanja peralatan dan mesin (belanja modal) : filling cabinet, sound system, headphone, kursi pimpinan rapat, kursi plastic, meja kipas embun air, tangga lipat, tripod, sofa, meja rapat, printer

8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pengurangan pada anggaran belanja security dan kebersihan yang menyesuaikan kontrak
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, diusulkan pengurangan anggaran karena menyesuaikan kebutuhan
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan, diusulkan pengurangan anggaran untuk anggaran belanja bensin karena penggunaan kendaraan dan kebutuhan bensin menyesuaikan kebutuhan
11. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, diusulkan berkurang untuk penghapusan anggaran fotocopy dan jilid dokumen
12. Reviu Laporan Kinerja, diusulkan pengurangan anggaran untuk penghapusan anggaran fotocopy dan jilid dokumen
13. perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, diusulkan berkurang untuk penghapusan anggaran fotocopy, anggaran fasilitasi penyusunan PKPT yang sudah masuk ke Subbag PEP, pengurangan honor Pj Walikota, dan pengurangan anggaran untuk fasilitasi Larwasda
14. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, diusulkan penyesuaian untuk pengurangan penyesuaian acara Workshop Investigasi yang semula fullday menjadi halfday, pengurangan honor nasum dan moderator Sosialisasi Anti Korupsi, honor tim Satgas Saber Pungli, seminar kit Sosialisasi Anti Korupsi, serta penambahan anggaran untuk fasilitasi jamuan rapat koordinasi Saber Pungli
15. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, diusulkan untuk pengurangan anggaran makan dan minum operasional karena penyesuaian jumlah personil

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Januari Tahun 2024 sampai dengan 30 Mei 2024 keseluruhan anggaran murni Inspektorat Kota Yogyakarta pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 14.096.537.035,-**

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 3) bahwa capaian fisik sebesar 39,99% dari target fisik 43,88% sampai dengan 30 Mei 2024 , sedangkan capaian keuangan sebesar 35,54 % dari target yang direncanakan sampai dengan 12 Juni 2023 sebesar 40,18%, terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan agar mencapai target 100% di akhir tahun.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW II (Per 30 Mei 2024 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (INSPEKTORAT) TA. 2024 (dari Data Fungsional Subbag Keuangan) atau **Tabel 2.4 sebagai berikut :**

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT TAHUN 2024**

Indikator dan Tujuan		Kriteria	
No.	Kode Indikator	Persyaratan	Skor
1	I.1.a	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketatahan dan 3E (Economis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
2	I.1.b	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Tabel 2.4. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2024 (30 Mei 2024)

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024												Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)					
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						1 Dokumen													
	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			15.180.000	40,00%	6.071.000	40,00%		4.508.000	100,00%	74,25%					
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						12 laporan													
	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dokumen													
	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.102.500	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0,00%					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2 Dokumen													
	17	Pengamanan Barang Milik Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			1.400.000	63,00%	850.000	63,00%		840.500	100,00%	98,88%					
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah						3 Dokumen													
	18	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.157.000	64,00%	736.000	64,00%		529.000	100,00%	71,88%					
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen													
	19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.125.000	53,00%	575.000	53,00%		572.000	100,00%	99,48%					
			Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD						12 Laporan													
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.125.000	53,00%	575.000	53,00%		572.000	100,00%	99,48%					

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket				
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024								
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD						2 Dokumen														
	21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.125.000	52,00%	575.000	52,00%	575.000	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen														
	22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0 Dokumen		0 Dokumen			750.143.500	30,81%	208.133.500	30,81%	355.257.000	100,00%	170,69%							Presentase keuangan melebihi target dikarenakan anggaran di Bulan Juni digunakan untuk melaksanakan kegiatan di bulan Mei, dimana anggaran bulan Mei telah terealisasi seluruhnya
			Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2 Dokumen														
	23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor			Dokumen		0 Dokumen			6.164.000	51,00%	2.250.000	51,00%	1.768.000	100,00%	78,58%							
			Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan						6 Jenis														
	24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			Dokumen		0 Dokumen			67.901.075	54,00%	21.835.225	54,00%	16.518.000	100,00%	75,65%							
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						64 Jenis														
	25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Dokumen		0 Dokumen			44.357.000	54,00%	22.884.000	54,00%	9.877.125	100,00%	43,16%							

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024												Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket			
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024									
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						19 Jenis															
	26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0 Dokumen		0 Dokumen			21.124.900	28,00%	5.590.900	28,00%	2.578.900	100,00%	46,13%								
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							10 Jenis															
	27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan			0 Dokumen		0 Dokumen			3.300.000	35,00%	1.100.000	35,00%	1.000.000	100,00%	90,91%								
		Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan							12 Dokumen															
	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			670.892.000	50,00%	297.076.000	50,00%	214.648.392	100,00%	72,25%								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12 Laporan															
	29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			7.270.000	93,00%	6.610.000	93,00%	6.601.000	100,00%	99,86%								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							2 Dokumen															
	30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			230.755.800	33,84%	53.184.000	46,13%	54.707.000	136,32%	102,86%							Pengadaan barang dilakukan lebih awal dari target	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							14 Unit															
	31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Dokumen		0 Dokumen			4.087.000	35,00%	1.060.000	35,00%	420.000	100,00%	39,62%								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							12 Laporan															
	32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0 Dokumen		0 Dokumen			6.000.000	40,00%	2.250.000	40,00%	1.226.169	100,00%	54,50%								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12 Laporan															
	33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			21.000.000	39,00%	7.750.000	39,00%	7.750.000	100,00%	100,00%								

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket				
							Target Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024								
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan						12 laporan														
	34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			399.420.000	41,66%	123.760.000	41,66%	98.719.250	100,00%	79.77%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan						12 laporan														
	35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0 Dokumen		0 Dokumen			29.280.000	47,00%	13.150.000	47,00%	8.285.465	100,00%	63,01%							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya						1 Unit														
	36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			0 Dokumen		0 Dokumen			218.350.000	35,83%	76.605.500	39,87%	25.365.110	111,28%	33,11%							pemeliharaan kendaraan operasional lapangan dilakukan lebih awal karena menyesuaikan kondisi dan keperluan kendaraan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						18 Unit														
	37	pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			42.428.000	49,00%	19.895.000	49,00%	7.340.500	100,00%	36,90%							
			Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara						6 Unit														
	38	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			196.000.000	85,43%	166.073.000	85,43%	159.552.910	100,00%	96,07%							

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d/tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d/tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			74.672.410	75,00%	55.476.410	65,00%	24.615.400	86,67%	44,37%						
		Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							55 Laporan													
		2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			86.126.600	16,00%	10.705.000	16,00%	8.861.977	100,00%	82,78%						
		Jumlah laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							35 laporan													
		3 Reviu Laporan Kinerja			0 Dokumen		0 Dokumen			11.777.250	100,00%	11.777.200	100,00%	11.273.000	100,00%	95,72%						
		Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja							1 Laporan													
		4 Reviu Laporan Keuangan			0 Dokumen		0 Dokumen			7.696.000	100,00%	7.300.000	100,00%	7.058.975	100,00%	96,70%						
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan							1 Laporan													
		5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP			0 Dokumen		0 Dokumen			28.145.900	31,35%	8.824.000	31,35%	5.288.620	100,00%	59,93%						
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							11 Dokumen													
		6 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			7.140.000	36,00%	2.285.000	36,00%	2.270.000	100,00%	99,34%						
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani							1 laporan													
		7 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			0 Dokumen		0 Dokumen			111.686.800	27,93%	30.605.000	27,93%	26.114.130	100,00%	85,33%						
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							25 Laporan									#DIV/0!	#DIV/0!			
Rata-rata capaian kinerja																		98,10%	67,32%			
Predikat kinerja																		sangat tinggi	sedang			

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024 (cut off 30 Mei 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024							
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra di Masing-Masing Bidang yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Masing-Masing Bidang x 100%	63,64% 70% 63,64% 70%	-			27,27% 50% 36,36% 50%	486.420.500	35,16%	141.037.000	25,79%	71.183.970	82,99%	68,29%					Irban Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Irban pengelolaan Keuangan dan Aset, irban Pembangunan Sarpras, dan irban Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	
	1	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		0 Dokumen		0 Dokumen			76.463.300	56,00%	42.306.000	20,00%	4.800.000	35,71%	11,35%							
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Yang Disusun						3 Rekomendasi														
	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		0 Dokumen		0 Dokumen			15.040.000	35,00%	4.780.000	35,00%	5.828.000	100,00%	121,92%							
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Disusun						1 Rekomendasi														
	3	Pendampingan Asistensi dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen			67.629.800	2,00%	828.000	2,00%	805.000	100,00%	97,22%							
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						44 perangkat Daerah														
	4	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		0 Dokumen		0 Dokumen			16.050.000	53,54%	8.593.000	33,33%	3.100.000	62,25%	36,08%							

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No : 100.3.4.3/2414/SE12024 tanggal 27 Mei 2024 hal Penyusunan Perubahan Rencana kerja pemerintah Daerah dan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Adapun perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 tidak lepas dari Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2024. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Tabel 3.1. Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 Inspektorat Kota Yogyakarta

KODE REKENING								PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH	
										MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN		
1								2	3	4	5	6	7	8	
6	01							BELANJA INSPEKTORAT				14.096.537.134	14.982.417.424	885.880.290	
6	01	6	01	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.282.871.674	14.233.046.674	950.175.000	
6	01	6	01	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				79.537.899	79.537.899	0	
6	01	6	01	01	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	11.121.799	11.121.799	0	
6	01	6	01	01	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.410.000	2.410.000	0	
6	01	6	01	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.975.000	2.975.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.434.100	2.434.100	0
6	01	6	01	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.605.000	2.605.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	15 laporan	55.986.000	55.986.000	0
6	01	6	01	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.006.000	2.006.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.477.826.000	11.341.373.000	863.547.000	
6	01	6	01	01	01	2	02	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83 orang/bulan	76 orang/bulan	10.458.621.000	11.322.168.000	863.547.000	
6	01	6	01	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	575.000	575.000	0

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH	
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN		
1									2	3	4	5	6	7	8	
6	01	6	01	01	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	575.000	575.000	0
6	01	6	01	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.150.000	1.150.000	0	
6	01	6	01	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	575.000	575.000	0	
6	01	6	01	01	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	575.000	575.000	0	
6	01	6	01	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	15.180.000	15.180.000	0	
6	01	6	01	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000	0	
6	01	6	01	01	01	2	03	03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				7.034.500	7.034.500	0	
6	01	6	01	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.102.500	1.102.500	0	
6	01	6	01	01	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000	1.400.000	0	
6	01	6	01	01	01	2	03	03	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKDP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.157.000	1.157.000	0	
6	01	6	01	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.125.000	1.125.000	0	
6	01	6	01	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.125.000	1.125.000	0	
6	01	6	01	01	01	2	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.125.000	1.125.000	0	

KODE REKENING										PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
												MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1										2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	01	01	2	05	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				750.143.500	750.143.500	0
6	01	6	01	01	01	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	750.143.500	750.143.500	0
6	01	6	01	01	01	2	06	06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				821.008.975	827.393.975	6.385.000
6	01	6	01	01	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.164.000	6.664.000	500.000
6	01	6	01	01	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	67.901.075	72.001.075	4.100.000
6	01	6	01	01	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	44.357.000	41.287.000	-3.070.000
6	01	6	01	01	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	21.124.900	25.634.900	4.510.000
6	01	6	01	01	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.300.000	3.300.000	0
6	01	6	01	01	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	670.892.000	671.237.000	345.000
6	01	6	01	01	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.270.000	7.270.000	0
6	01	6	01	01	01	01	2	07	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				230.755.800	358.376.800	127.621.000
6	01	6	01	01	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	230.755.800	358.376.800	127.621.000
6	01	6	01	01	01	01	2	08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				430.507.000	401.779.000	-28.728.000
6	01	6	01	01	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.087.000	4.087.000	0
6	01	6	01	01	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	0
6	01	6	01	01	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	21.000.000	21.000.000	0

KODE REKENING										PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
												MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1										2	3	4	5	6	7	8
6	01	6	01	01	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	399.420.000	370.692.000	-28.728.000
6	01	6	01	01	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				486.058.000	467.408.000	-18.650.000
6	01	6	01	01	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	1 Unit	1 Unit	29.280.000	27.380.000	-1.900.000
6	01	6	01	01	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	218.350.000	201.600.000	-16.750.000
6	01	6	01	01	01	01	2	09	06	pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	42.428.000	42.428.000	0
6	01	6	01	01	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	196.000.000	196.000.000	0
																0
6	01	6	01	01	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				327.244.960	304.107.550	-23.137.410
6	01	6	01	01	02	2	01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal				208.418.160	185.280.750	-23.137.410
6	01	6	01	01	02	2	01	01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	55 Laporan	55 Laporan	74.672.410	73.076.250	-1.596.160
6	01	6	01	01	02	2	01	02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 laporan	35 laporan	86.126.600	65.001.600	-21.125.000
6	01	6	01	01	02	2	01	03		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	11.777.250	11.361.000	-416.250
6	01	6	01	01	02	2	01	04		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	7.696.000	7.696.000	0
6	01	6	01	01	02	2	01	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	11 Dokumen	11 Dokumen	28.145.900	28.145.900	0
6	01	6	01	01	02	2	02			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				118.826.800	118.826.800	0
6	01	6	01	01	02	2	02	01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 laporan	1 laporan	7.140.000	7.140.000	0

KODE REKENING									PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH	
											MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN		
1									2	3	4	5	6	7	8	
6	01	6	01	01	01	02	2	02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan	25 Laporan	111.686.800	111.686.800	0
															0	
6	01	6	01	01	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				486.420.500	445.263.200	-41.157.300
6	01	6	01	01	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				91.503.300	78.401.000	-13.102.300
6	01	6	01	01	01	03	2	01	01	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bdiang Penagwasan Yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	76.463.300	63.361.000	-13.102.300
6	01	6	01	01	01	03	2	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	15.040.000	15.040.000	0
6	01	6	01	01	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi				394.917.200	366.862.200	-28.055.000
6	01	6	01	01	01	03	2	02	01	Pendampingan Asistensi dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44 perangkat Daerah	44 perangkat Daerah	67.629.800	67.629.800	0
6	01	6	01	01	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	16.050.000	16.050.000	0
6	01	6	01	01	01	03	2	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	277.698.400	259.211.400	-18.487.000
6	01	6	01	01	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	33.539.000	23.971.000	-9.568.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Mei 2023 (TW II) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Inspektorat Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta tahun 2024 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah kota Yogyakarta, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dll.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar **Rp. 885.880.191,- atau 6,28%** dari anggaran semula murni Rp. **14.096.537.134,-** menjadi anggaran perubahan Rp. **14.982.417.424,-** perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Inspektorat Tahun 2024.

Yogyakarta, 3 Juni 2024

